

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian Program Studi

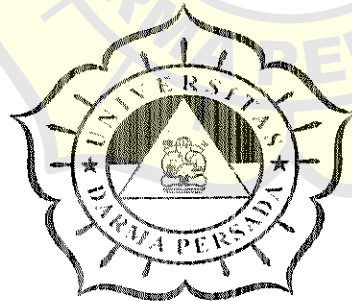
Strata Satu (S I) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Darma Persada

Oleh

Melly Inayati

04420005



FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2009



FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JURUSAN AKUNTANSI

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul :

**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II**

Oleh :

Nama : Melly Inayati

NIM : 04420005

Telah disetujui untuk diujikan.

Jakarta, Maret 2009

Mengetahui,

Kajur Akuntansi

Pembimbing Materi

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)

(Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM)



**FAKULTAS EKONOMI – UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JURUSAN AKUNTANSI**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul :
**KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA PUSAT II**

Telah dipertahankan dihadapan sidang Tim Penguji pada :


Tanggal : 30 Maret 2009

Oleh :

Nama : Melly Inayati

NIM : 04420005

PANITIA PENGUJI SKRIPSI

<u>Nama</u>	<u>Jabatan</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak,MM.	Ketua	
2. Drs. Sunarto Widodo, Ak,MM.	Anggota	_____
3. Drs. Imam Nugroho, Ak,MM.	Anggota	_____

LEMBAR PERNYATAAN


Skrpisi yang berjudul : KONTRIBUSI PAJAK HOTEL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA SUKU DINAS PENDAPATAN
DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT II.

Merupakan karya ilmiah yang penulis susun dan dibuat sebaik-baiknya, dimana seluruh isi yang ada di dalam skripsi ini merupakan hasil karya tulis dan menjadi tanggung jawab penulis.

Demikianlah pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, Maret 2009

Penulis

6000
To:

(Melly Inayati)

ABSTRAK

- (A) Melly Inayati
- (B) Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II.
- (C) ix + 90 ; 2009
- (D) **Kata Kunci** : Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (E) **Alasan dan Tujuan Penelitian**: Untuk menganalisis sejauh mana dampak dari kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II.
Metodelogi Penelitian : Data yang digunakan merupakan data sekunder bukti, catatan, atau laporan historis yang tersusun dalam arsip (dokumen). Data diperoleh melalui riset kepustakaan dan melalui riset lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi.
Kesimpulan dan Saran : melalui data yang dianalisis, dapat dijelaskan bahwa rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan meskipun untuk tahu 2005 dan 2006 mengalami kenaikan. Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis *ratio* vertikal, analisis *ratio* horizontal, dan analisis *trend*. Saran yang diberikan penulis adalah Suku dinas pendapatan daerah Jakarta Pusat II harus dapat meningkatkan pendapatan dari pajak hotel melalui cara ekstensifikasi ataupun intensifikasi sehingga kenaikan PAD yang tinggi dapat diikuti oleh kenaikan pendapatan pajak hotel yang tinggi juga.
- (F) Daftar Acuan : 13 sumber
- (G) Dosen Pembimbing : Drs. Boedi Setyo Hartono, Ak, MM

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan judul “Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh Ujian Sidang dan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Universitas Darma Persada, Jakarta. Yang pada saat penyusunan skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat manfaat dan juga hambatan serta rintangan yang alhamdulillah dapat dilalui.

Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan berupa waktu, tenaga dan pikiran baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terutama kepada :

1. Bapak dan mama tercinta yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan materil, serta kakak-kakakku tersayang yang selalu memberikan semangat dan doa selama penulis menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan “Amin”.

2. Bapak Drs.Boedi Setyo Hartono, Ak, MM, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada dan Pembimbing yang dengan sabar selalu memberikan semangat, masukan dan nasehat yang sangat-sangat berharga hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi.
3. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Darma Persada yang telah memberikan ilmunya untuk saya dan teman-teman.
4. Ibu Yuspin selaku Kepala Bagian Tata Usaha Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat II yang membantu penulis dalam penelitian dan yang telah memberikan kemudahan dalam pencarian data.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan (Teti, Sheila, Puti, Yeni, Minda dan Dina) yang selalu siap membantu dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman angkatan 2004 dan teman-temanku didalam maupun diluar kampus yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Semoga segala bantuan,bimbingan dan arahan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan karena keterbatasan penulis, untuk itu penulis mengharapkan sumbang saran dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Jakarta, Maret 2009

(Melly Inayati)



DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR GAMBAR..... viii

DAFTAR TABEL..... ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Identifikasi Masalah..... 7

1.3 Pembatasan Masalah..... 8

1.4 Perumusan Masalah..... 8

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 8

a. Tujuan Penelitian..... 8

b. Manfaat Penelitian..... 8

1.6 Metodologi Penelitian..... 9

a. Sumber dan Jenis Data..... 9

b. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1. Penelitian Lapangan.....	10
2. Penelitian Keputusan.....	10
3. Analisis Data.....	11
1.7 Kerangka Penelitian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan.....	14

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pajak.....	16
a. Pengertian Pajak.....	16
b. Fungsi Pajak.....	18
c. Syarat Pemungutan Pajak.....	20
d. Asas Pengenaan Pajak.....	21
e. Sistem Pengenaan Pajak.....	23
f. Hukum Pajak Formal dan Materil.....	25
g. Jenis Pajak.....	27
2.2 Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.3 Pajak Daerah.....	29
a. Pengertian Pajak Daerah.....	29
b. Efisiensi dan Efektifitas Pajak Daerah.....	31
c. Sanksi Pajak Daerah.....	34
d. Perkembangan Pajak Daerah.....	36

2.3.1 Pajak Hotel.....	40
a. Objek dan subjek Pajak Hotel.....	41
b. Tarif dan Penghitugan Pajak Hotel.....	42
2.5 Analisis Rasio.....	43

**BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM SUKU DINAS
PENDAPATAN DAERAH JAKARTA PUSAT II**

3.1 Sejarah.....	45
3.2 Struktur Organisasi.....	47
3.3 Tugas Pokok dan Fungsi.....	50
a. Tugas Pokok.....	50
b. Fungsi.....	50
3.4 Rencana Penerimaan.....	51
3.5 Sasaran dan Capaian Visi Misi.....	52

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektifitas Pemungutan Pajak Hotel dengan Menggunakan <i>Self Assessment system</i>	55
4.2 Peranan Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Pajak Hotel.....	74

a. Pelaksanaan Pencairan Tunggalan Pajak Hotel.....	75
b. Sosialisasi Peraturan Pajak Daerah Pajak Bagi Wajib Pajak dan Aparat Pajak.....	76
c. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Pajak Hotel.....	77
d. Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II.....	78
4.3 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah	79

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar I	Kerangka Berfikir.....	13
Gambar II	Struktur Organisasi.....	47
Gambar III	Grafik <i>Tren</i> Pertumbuhan Pajak Hotel dalam Prosentese.....	71
Gambar IV	Grafik <i>Tren</i> Pertumbuhan Pajak Hotel dalam Rupih.....	72
Gambar V	Grafik <i>Tren</i> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI dalam Prosentase.....	86
Gambar VI	Grafik <i>Tren</i> Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI dalam Rupiah.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel I	Rasio Efektifitas Penerimaan Rencana Pajak Daerah.....	56
Tabel II	Rasio Efektifitas Penerimaan Realisasi pajak Daerah.....	57
Tabel III	Rasio Ektifitas Penerimaan Pajak Hotel.....	65
Tabel IV	Rasio Vertikal Penerimaan Pajak Hotel.....	68
Tabel V	Kontribusi Pajak Hotel PAD.....	80
Tabel VI	Rasio Vertikal Penerimaan Pajak Hotel dan PAD.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Sumber – sumber penerimaan tersebut antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain- lain PAD yang sah;
2. Dana penerimaan, dan
3. Lain- lain penerimaan

Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah diberikan keleluasaan dan kewenangan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah-langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri dan potensi daerah yang mungkin dapat menghasilkan bagi keuntungan daerah sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah yang sebagian besar didominasi dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan. Dengan ini akan semakin memperbesar keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Kiranya dengan ini asas ini pemerintah perlu memberikan jalan keluar agar seluruh daerah yang ada di Indonesia berkembang secara merata.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari PAD, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. PAD sendiri terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri.

Jakarta Pusat merupakan bagian dari Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Jakarta Pusat sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan PAD berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Jakarta Pusat berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah Jakarta Pusat dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran dan belanja pemerintah daerah.

Upaya untuk meningkatkan PAD tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen PAD. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah Jakarta Pusat dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas sepuluh jenis Pajak Daerah (Dipenda Jakarta Pusat II), antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;

4. Pajak Hotel;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Reklame;
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB); dan
10. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui *official assessment sistem dan self assessment system* . Sistem pemungutan ini dilakukan melalui dua cara yaitu surat ketetapan pajak dan retribusi.

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

Tarif pajak hotel yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah sebesar 10%.
Objek pajak hotel menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2003 adalah:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
2. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;

3. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan oleh hotel khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum;
4. Jasa persewaan ruangan atau kegiatan acara pertemuan di hotel;
5. rumah makan atau restoran atau yang sejenisnya yang merupakan satu menejemen dengan hotel;

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pajak hotel karena hotel sangat berpotensi untuk menyumbang pajak terbesar di daerah DKI Jakarta , khususnya di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II. Yang penulis beri judul **“Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas maka timbul beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana efisiensi pelaksanaan pemungutan pajak hotel dengan menggunakan *self assessment system*?
2. Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap penerimaan PAD?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka peneliti membatasi masalah tersebut hanya pada masalah pengaruh kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II dalam kurun waktu 5 tahun yaitu mulai dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang dikemukakan, maka perumusan masalah dapat dirumuskan menjadi:

1. Apakah pelaksanaan pemungutan pajak hotel sudah efisien dengan menggunakan *self assessment system*?
2. Apakah penerimaan Pajak Hotel berpengaruh cukup signifikan Terhadap PAD?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel dengan *Self Assessment system*.
2. Untuk mengukur pengaruh Pajak Hotel terhadap PAD
3. Untuk menganalisis laju pertumbuhan dan realisasi penerimaan Pajak Hotel di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II.

Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, maka hasilnya akan berguna sebagai:

1. Tambahan referensi ilmiah mengenai pajak hotel.
2. Salah satu bahan pertimbangan yang dapat digunakan dalam menentukan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah daerah terhadap pajak hotel.
3. Bagi peneliti sendiri sekiranya dapat meningkatkan pengetahuan, menambah pengalaman dan wawasan penelitian dimasyarakat khususnya bidang pajak hotel.

1.6 Metodologi Penelitian

1. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari petugas Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II. Data tersebut mencakup: data penerimaan pajak hotel dan data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Pusat II yang dapat dilihat dari laporan keuangan per periode, yakni laporan selama 5 tahun, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Penelitian Lapangan

1) Wawancara

Merupakan tehnik penelitian dimana peneliti mengadakan komunikasi langsung dengan pejabat yang berwenang, meminta dan mempelajari dokumen perusahaan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2) Observasi

Merupakan tehnik penelitian dimana penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Dari informasi yang diperoleh, penulis dapat membuat analisa sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai objek-objek yang diteliti.

3) Telaah Data

Merupakan tehnik penelitian dimana penulis melakukan pemeriksaan secara kritis terhadap data yang didapat baik dari jawaban tertulis, wawancara, observasi, catatan, rekaman atau dokumen resmi. Dari hasil penelaahan ini, akan dilakukan pembuatan abstraksi untuk mereduksi data tanpa mengurangi inti dari data yang telah di dapat.

b. Penelitian Kepustakaan

Tehnik ini dilaksanakan dengan maksud untuk memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai landasan teori guna mendukung data-data primer yang diperoleh dari buku-buku serta referensi-referensi yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan analisis ratio vertikal yaitu membandingkan pajak hotel terhadap total PAD, ratio horizontal yaitu membandingkan pajak hotel dari tahun ke tahun dan perbandingan pajak hotel antara rencana dan realisasi terakhir data dianalisa menggunakan analisa trend. Dikarenakan penelitian ini berusaha untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan daerah, maka metode yang digunakan adalah mengacu pada metode asosiatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variable atau lebih.

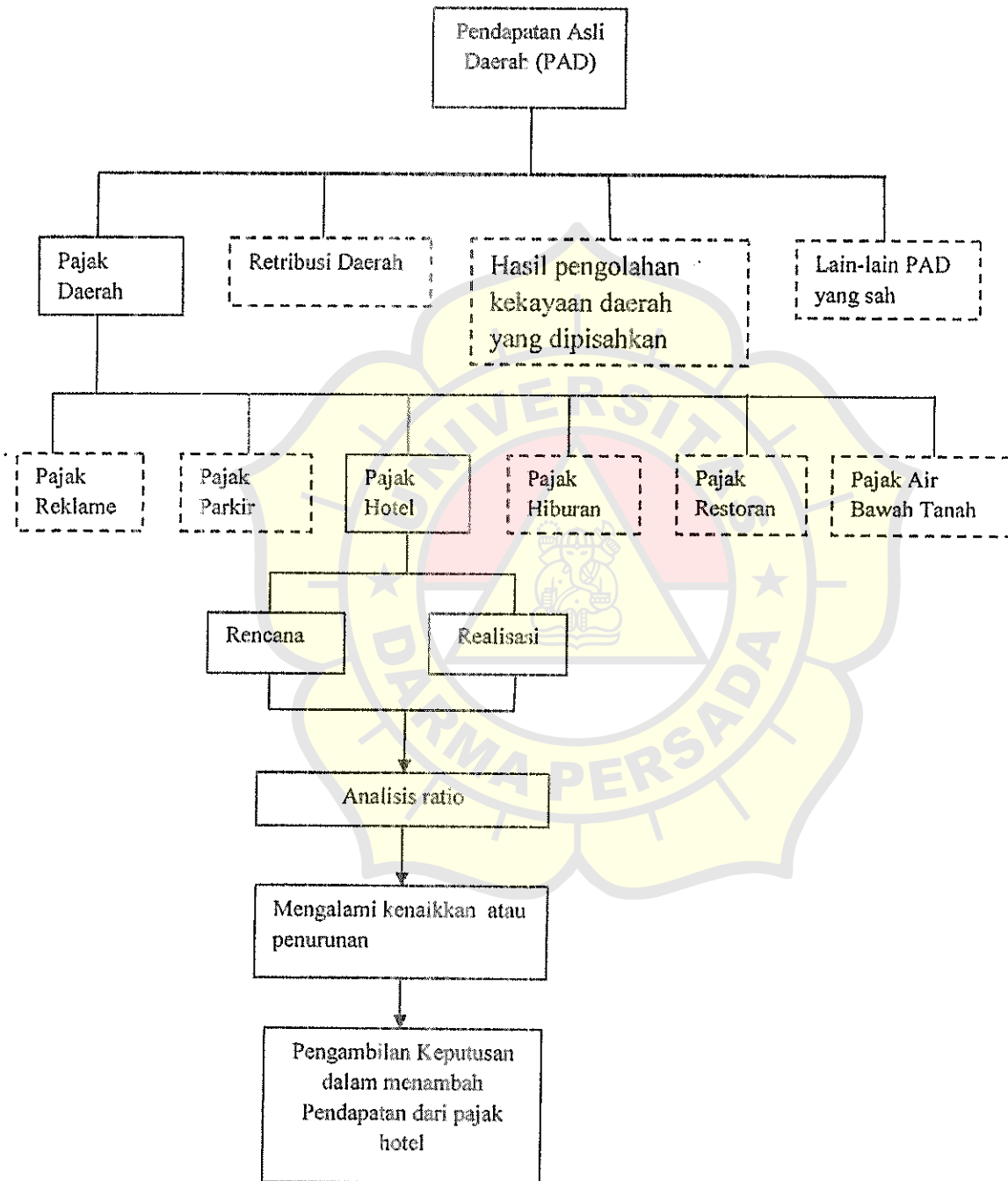
1.7 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini dibuat untuk dapat memperjelas secara deskriptif naratif yang menggambarkan keterkaitan konsep-konsep kunci, yang secara integral “potret” (manifestasi) dari fokus permasalahan. Dengan diundangkannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khususn Ibukota Negara Republik Indonesia yaitu Jakarta. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Pertimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4) Lain-lain penerimaan yang sah. Konsekuensi yang dihadapi

oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan Propinsi DKI Jakarta tidak memiliki sumberdaya alam sehingga perolehan dana perimbangannya relative kecil, sehingga harus meningkatkan sumber potensi keuangan adalah pajak daerah.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hasil pemungutan pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Selanjutnya, pada masa UU No 18 Tahun 1997 Pajak daerah dibedakan menjadi dua golongan yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II. Pajak daerah tingkat II meliputi Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Parkir, Pajak Hiburan, dan Pajak Air Bawah Tanah (PABT). Dan yang akan dibahas oleh penulis Pajak hotel. Hotel adalah “Bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran. Untuk lebih jelasnya berikut adalah kerangka penelitian yang digunakan penulis :

Gambar Kerangka Penelitian



Sumber Perda Nomor 4 Tahun 2002 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang diolah oleh penulis

1.8 Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini, penyajian skripsi disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan Bab pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memahami keseluruhan hasil skripsi. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, kerangka penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan landasan teoriskripsi yang berfungsi sebagai dasar umum dalam pembatasan skripsi. Teori yang dipakai mengenai pajak, pajak asli daerah, pajak daerah, pajak hotel dan berbagai teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB III SEJARAH DAN GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisikan sejarah perusahaan, struktur organisasi, kegiatan utama perusahaan dan gambaran umum perusahaan yang akan diteliti penulis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan materi dari skripsi yang berisikan hasil penelitian mengenai pengaruh pajak hotel dan peranan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari pajak hotel terhadap PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan sebagai rangkuman dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Serta saran-saran yang dianggap perlu sehubungan dengan pengaruh dari penelitian pajak hotel terhadap penerimaan PAD di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II dari penulis mengenai hubungan tersebut.